



LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2020

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Lapopran Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos pos laporan Keuangan	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing masing pos pos pelaporan keuangan
		5.1.1 Pendapatan
		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Beban
		5.1.4 Aset
		5.1.5 Kewajiban
		5.1.6 Ekuitas Dana
Bab VI	Penjelasan atas informasi informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 31 Desember 2020

Plt. Camat Bontang Utara,

Chahyo Hadi Wichakso, S.STP

NIP 198401022003121002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2020 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah nihil.

Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 57.315.112.776,- atau mencapai 94,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 60.485.613.539,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 57.297.524.080,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 29.132.060,- Aset Tetap (netto) sebesar Rp 56.517.560.927,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 750.831.093,-

Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 838.378.045,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar. Jumlah beban adalah sebesar Rp 49.358.656.697,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (49.358.656.697,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 48.247.355.739,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (49.362.941.981,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 57.588.724.277,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 56.473.138.035,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Kecamatan Bontang Utara disusun sebagai pertanggungjawaban Camat Bontang Utara atas pelaksanaan tahun anggaran 2020. Laporan Keuangan sebagai bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kecamatan Bontang Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara, adalah :

- Untuk menyajikan informasi detail mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bentuk evaluasi bagi para pengguna dan pedoman dalam membuat dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- Untuk menyajikan informasi yang memenuhi prinsip prinsip Laporan Keuangan yaitu relevan, akuntabel oleh seluruh sumber daya di Kecamatan Bontang Utara
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
- Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB II
KEBIJAKAN EKONOMI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro / Regional Ekonomi Makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan dan pasar, ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kota Bontang, dengan perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan Perwujudan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya yang berpihak kepada rakyat.

Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2020 juga dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut : Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan

- keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap
- jenis belanja; Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun
- pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Indikator Kecamatan Bontang Utara sebagai fungsi Tata Pemerintahan berusaha

Pencapaian Target Kinerja APBD agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada good governance dan clean government;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- e. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Bontang
Realisasi Utara
Pencapaian Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Target Kinerja
Keuangan

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan	-	-	
Belanja Tidak Langsung	18.822.928.654,-	16.722.973.378, -	88,84
Belanja Langsung	41.662.684.885,-	40.592.139.398, -	97,43

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kecamatan Bontang Utara antara lain :

- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perencanaan, utamanya dalam penyusunan perubahan anggaran tahun berjalan, sehingga realisasi.
- Terjadinya kenaikan belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung merupakan realisasi belanja yang tidak dapat dihindari sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah, utamanya dalam lingkup OPD.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Bontang Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi e finance yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD

Aplikasi e finance terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-Aset). E Finance dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIM Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi **A.3. Basis Akuntansi**

Kecamatan Bontang Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kecamatan Bontang Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut :

Belanja

(1) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(2) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(5) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(7) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan Rp 0,

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 pada Kecamatan Bontang Utara nihil. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Belanja

Realisasi Belanja

Rp 57.315.112.776,-

Realisasi Belanja Kecamatan Bontang Utara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 57.315.112.776,- atau 97,43% dari anggaran belanja sebesar Rp 60.485.613.539,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	19.280.558.654,-	17.131.083.378,-	88,85
Belanja Barang dan Jasa	31.670.721.867,-	30.958.669.520,-	97,75
Belanja Modal	9.534.000.018,-	9.225.359.878,-	96,76
Total	60.485.613.539,-	57.315.112.776,-	94,76

Di bandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.106.486.795 atau sebesar 7,72%

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI 2019	NAIK (TURUN)) %
Belanja Pegawai	17.131.083.378,-	18.048.459.361,-	(5,08)
Belanja Barang	30.958.669.520,-	30.521.922.812,-	1,43
Belanja Modal	9.225.359.878,-	4.638.243.810,-	49,71
	57.315.112.776,-	53.208.625.981,-	7.72

Belanja Pegawai Rp
17.131.083.378,-

Belanja Pegawai

realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.048.459.361,- dan Rp 17.131.083.378,- Realisasi belanja TA 2020 mengalami Penurunan sebesar 5,08 persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh Ada Beberapa Pegawai yang Purna Tugas (Pensiun)

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

U R A I A N	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.925.558.109,-	7.120.919.807,-	(2,74%)
Belanja Tambahan Penghasilan	9.797.415.269,-	10.648.499.554,-	(7,99%)
Honorarium PNS	144.210.000,-	17.940.000,-	703,84
Honorarium Non PNS	263.900.000,-	261.100.000,-	1,07
Jumlah Belanja	17.131.083.378,-	18.048.459.361,-	(5,08)%

Belanja Barang Rp 30.958.669.520,-

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 30.958.669.520,- dan Rp 30.521.922.810,-. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 436.746.710,- atau Naik sebesar 1,43% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Belanja Modal Rp 9.225.359.878,-

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2020 Kecamatan Bontang Utara dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 9.225.359.878,- dan Rp 4.638.243.810,-. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 98,90 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019

Penjelasan Atas Pos Pos Neraca

Aset Lancar

Persediaan Rp
29.132.060,-

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 29.132.060,- dan Rp 52.523.465,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	2020	2019
Alat Tulis Kantor	9.934.000	37.659.710
Barang cetakan	10.777.910	12.432.255
Persediaan Peralatan Listrik	352.000	222.500
Persediaan BBM	494.550	1.600.000
Persediaan Peralatan Komputer	7.573.600	
Persediaan Pembersih	-	495.000
Persediaan Benda Pos		114.000
Jumlah	29.132.060	52.523.465

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

ASET TETAP

Tanah

Rp 5.388.227.401,-

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kecamatan Bontang Utara per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 5.388.227.401,- dan Rp. 5.307.869.401,- terdapat Kenaikan sebesar nilai aset Tanah sebesar Rp. 80.358.000,- di karenakan adanya Belanja Modal Pematangan Lahan sebesar Rp. 79.228.000,- dan Kapitalisasi dari Honorarium sebesar Rp. 1.130.000,-

Peralatan dan

Mesin

Rp 17.048.457.847,-

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 17.048.457.847,- dan Rp 11.807.075.241,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Akhir 2019	11.807.075.241
Pengadaan per 31 Desember 2020	4.799.024.130
	16.606.099.371
Mutasi Tambah	505.821.526
	17.111.920.897
Mutasi Kurang	63.463.050
Saldo akhir 2020	17.048.457.847

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium sebesar Rp. 2.280.000,- terdiri dari honor PPTK,PPBJ dan PJPHP.
- Terdapat Mutasi Tambah Kapitalisasi Honorarium sebesar Rp. 2.040.000,- terdiri dari honor PPTK,PPBJ dan PJPHP.
- Terdapat Mutasi Tambah Reklas antar KIB dari KIB C ke KIB B berupa alat kantor lainnya.
- Reklas dari Persediaan Ke Aset Kecamatan Bontang Utara berupa Alat Pembersih, Alat Dapur dan Alat Rumah Tangga Lainnya.

- e. Reklas dari persediaan Kecamatan Bontang Utara senilai Rp. 3.317.750,- berupa kursi Plastik.
- f. Reklas Persediaan ke Aset kelurahan gunung elai sebesar Rp. 26.730.000,- berupa alat peraga bidang pendidikan/ketrampilan lainnya.
- g. Reklas dari Persediaan ke aset Kelurahan Guntung berupa alat kantor lainnya senilai Rp. 23.100.000,- dan alat rumah tangga lainnya senilai Rp. 10.864.700,-
- h. Terdapat Mutasi Tambah Reklas dari persediaan ke Asset senilai Rp.15.172.000,- berupa alat kantor lainnya.
- i. Mutasi Tambah dari BPKAD berupa kendaraan motor berpenumpang senilai Rp. 60.000.000,-
- j. Terdapat Mutasi Tambah reklas antar KIB sebesar Rp. 65.340.000,- (reklas dari KIB C ke KIB B belanja modal pengadaan kontruksi taman berupa pot bunga) Kelurahan Api-Api
- k. Terdapat mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 2.150.000,- (Honorarium PPTK, PPBJ dan PjPHP) Kelurahan Api-Api.
- l. Terdapat mutasi tambah reklas dari persediaan ke asset berupa papan Nama Kelembagaan PKK senilai Rp. 8.998.000,- Kelurahan Api-API
- m. Terdapat Mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 2.580.000,-(PPTK,PPBJ dan PjPHP) Kelurahan Bontang Kuala
- n. Terdapat Mutasi Tambah Reklas dari Persediaan ke Aset berupa Plang Nama Trantib Rp. 1.300.000,- dan Papan Nama Informasi Rp. 1.850.000,- Serta lampu dan Tiang Lampu Senilai Rp. 67.586.400,- Kelurahan Bontang Baru.
- o. Terdapat Mutasi tambah kapitalisasi senilai Rp. 1.130.000,- (PPTK,PPBJ dan PjPHP Kel. Bontang Baru
- p. Terdapat Mutasi tambah kapitalisasi senilai Rp. 1.020.000,- (PPTK,PPBJ dan PjPHP Kel. Gunung Elai
- q. Terdapat Mutasi tambah kapitalisasi senilai Rp. 2.030.000,- (PPTK,PPBJ dan PjPHP Kel. Loktuan

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdapat Mutasi Kurang Ekstracomtabel sebesar Rp. 1.985.000,- terdiri dari Tempat sampah dorong Rp. 1.000.000,- Meja Kompor Rp. 420.000,- Kompor Gas Rp. 400.000,- dan Tabung Gas Elpiji Rp. 165.000,- Kecamatan Bontang Utara.
- b. Terdapat Mutasi Kurang Ekstracomtabel sebesar Rp. 3.731.750,- berupa kursi 10 buah @Rp. 373.175,- Kelurahan Bontang Kuala
- c. Terdapat Mutasi Kurang Ekstracomtabel sebesar Rp. 950.000,- berupa Pompa Air kelurahan Bontang Baru.

- d. Terdapat Mutasi Kurang Ektracomtabel sebesar Rp. 29.370.000,- berupa kursi 100 buah @Rp. 290.370,- Kelurahan Api-Api.
- e. Terdapat Mutasi Kurang Ektracomtabel sebesar Rp. 13.434.300,- berupa kursi Lipat dan alat ukur tinggi badan Kelurahan Gunung Elai.
- f. Terdapat Mutasi Kurang Ektracomtabel sebesar Rp. 13.992.000,- berupa kursi Kelurahan Guntung.

Gedung dan

Bangunan

Rp 45.199.146.803,-

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp 45.199.146.803,- dan Rp 43.045.067.464,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des. 2019	43.045.067.464
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020	<u>2.807.336.098</u>
	45.852.403.562
Mutasi Tambah	71.933.090
	<u>45.924.336.652</u>
Mutasi Kurang	725.189.849
	<u>45.199.146.803</u>
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	45.199.146.803

Rincian Mutasi Tambah aset tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar Rp 39.723.090,- ke KIB ke Gedung dan bangunan berupa kontruksi jarring lapangan Volly.
- b. Reklas dari Persediaan Kelurahan Guntung berupa kanopi (belanja bahan baku bangunan) Senilai Rp. 29.700.000,-
- c. Mutasi Tambah berupa kapitalisasi dari honorarium sebesar Rp. 1.070.000,- (PPTK,PPBJ dan PJPHP) Bontang Kuala

- d. Mutasi Tambah berupa kapitalisasi dari honorarium sebesar Rp. 300.000,- (PPTK)
- e. Mutasi Tambah berupa kapitalisasi dari honorarium sebesar Rp. 1.140.000,- (PPTK,PPBJ dan PJPHP) Kel. Gunung Elai

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi*
1.457.354.404,-

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.457.354.404,- dan Rp 1.127.219.294,. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan 2020 adalah sebagai berikut .

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 1.127.219.294,-
Pengadaan 2020	<u>Rp. 40.629.800,-</u>
	Rp. 1.167.849.094,-
Mutasi Tambah	<u>Rp. 289.505.310,-</u>
Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.457.354.404,-

Mutasi Tambah JIJ dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat Mutasi Kurang Reklas antar KIB dari KIB C ke D senilai Rp. 198.131.000,-
2. Terdapat Mutasi Tambah Reklas dari persediaan senilai Rp. 90.244.310,- berupa Kontruksi MCK Kelurahan Bontang Baru
3. Kapitalisasi dari honorarium Rp. 1.130.000,- (PPTK,PPBJ dan PJPHP)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
16.277.230.966,-*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah Rp 16.277.230.966,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Per 2020	12.470.277.360
Tambahan Nilai Akumulasi Penyusutan karna perhitungan system baru	820.404.880
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2020	2.059.452.334
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA.2020	880.627.138
Beban Penyusutan Jalan, irigasi, dan jaringan TA 2020	46.469.254
Akumulasi Penyusutan 31 Des 2020	16.277.230.966

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

*Aset Lainnya Rp
868.719.994,-*

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 adalah masing -masing Rp 299.759.994,-. Dan Rp. 868.719.994,-

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2019 adalah sebesar (209.679.990,-) dan Tahun 2020 sebesar (330.349.694,-)

Utang Belanja Rp

838.378.045,-

Utang Belanja

Nilai Utang belanja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 838.378.045,-. Utang belanja merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan pada bulan berikutnya.

Beban Pegawai

Rp17.889.367.367,-

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 17.889.367.367,-

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Rp 15.648.037.630,-

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 15.648.037.630,- dan Rp 2.517.799.527,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

*Beban Barang dan
Jasa Rp
12.980.314.281*

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 12.980.314.281,- dan Rp 10.836.123.041,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Beban
Pemeliharaan Rp
1.079.445.331,-*

Beban pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.079.445.331,- dan Rp. 396.009.190,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas Rp
1.279.469.008,-*

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1,279.469.008,- dan Rp 2.293.630.049,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Penyusutan **Beban Penyusutan**

Rp. 3.806.953.606,- Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.806.953.606,- dan Tahun 2019 senilai Rp. 2.015.989.122,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Lain-lain **Beban Lain-lain**

Rp. 119.142.648,- Beban Lain-lain untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing – masing Rp. 119.142.648,- dan Rp. 62.150.716,-

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp

48.238.235.639,-

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 48.238.235.639,- dan Rp 38.302.233539,96

Defisit LO

Rp50.973.177.510,-

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 50.973.177.510,- dan Rp 48.840.448.417,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.804.310.821,-

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kecamatan Bontang Utara merupakan perangkat daerah Kota Bontang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

Dasar pembentukan Kecamatan Bontang Utara merujuk pada sejumlah regulasi yaitu :

- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja dan kewenangan yang langsung dilimpahkan, Kecamatan memiliki aspek strategis dalam pencapaian visi misi Pemerintahan.

Berdasarkan prinsip 'close to the customers' sudah seharusnya Pemerintah memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Hal ini pun telah tertuang dalam Permendagri nomor 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dengan PATEN, Kecamatan dapat berfungsi sebagai :

- Pusat Pelayanan Masyarakat
- Simpul Pelayanan bagi kantor / badan pelayanan terpadu di Kota Bontang
- Fasilitator dan Mediator penyelesaian permasalahan permasalahan sosial, politik, agama dan urusan kemasyarakatan lainnya.

Tugas, Pokok dan Fungsi

Menurut PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan adalah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah dan dipimpin seorang Camat yang menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pada pasal (15) disebutkan pula kewenangan lain sebagaimana pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sementara sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka tugas pokok Camat adalah menjalankan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. **Menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan**, dalam hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan asas desentralisasi
- b. **Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan**, dalam hal ini Kecamatan harus mampu melakukan koordinasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan di wilayah kerja kecamatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja tersebut, melakukan evaluasi dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di wilayahnya.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dimaksud telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta perubahan yang terakhir. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapat Perubahan Peraturan Walikota nomor 27 Tahun 2012. Memperhatikan ketentuan diatas, maka laporan keuangan Pemerintah daerah kota bontang Tahun 2020 khususnya laporan keuangan akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dan disajikan sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan Bersih.

Adapun tujuannya menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran , arus kas, serta neraca sehingga bermanfaat bagi pengguna laporan untuk memahami Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bontang khususnya Kecamatan Bontang Utara Tahun 2019

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara TA 2016 ini dibuat untuk menjadi bahan konsolidasi dan evaluasi Kecamatan Bontang Utara kedepannya.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PPKD Kecamatan Bontang Kota Bontang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 31 Desember 20**20**
Pegguna Anggaran

Chahyo Hadi Wichakso,S.STP
Nip. 198401022003121002